



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Nomor : B-276/D.PHP.2/PP.04.02/2/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

21 Februari 2022

Yth. Bapak/Ibu
(daftar terlampir)
di –
Jakarta

Dalam rangka Penyusunan Rancangan Permen PPPA tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menyelenggarakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada:

hari/tanggal : Jumat, 24 Februari 2023
waktu : pukul 09.00 WIB – Selesai
tempat : Hotel Harris Vertu
Jl. Hayam Wuruk No.6, RW.2, Gambir, Jakarta Pusat

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mohon kehadiran Saudara untuk memberikan masukan pada rapat dimaksud. Konfirmasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menghubungi Sdri. Mutia No. HP. 08119990501.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,

Ratna Susianawati

Tembusan Yth.
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAMPIRAN UNDANGAN

Nomor : B- 276 /D.PHP.2/PP.04.02/2/2023

Tanggal : 21 Februari 2023

DAFTAR UNDANGAN

Lembaga Swadaya Masyarakat (perwakilan 1 orang)

1. *International Organization of Migration* - IOM
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK)
3. Serikat Buruh Migran Indonesia - SBMI
4. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)
5. Migrant care
6. Migrant Institute
7. Solidaritas Perempuan
8. UN Women
9. Ibu Enggar

Kementerian PPPA

10. Kepala Biro Hukum dan Humas
11. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
12. Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
13. Asisten Deputi Bidang Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
14. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
15. JF Madya di Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
16. JF Madya di Asdep Pekerja dan Tindak Perdagangan Orang
17. JF Muda di Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan,

Ratna Susianawati